

Judul : Presiden minta perusahaan terlibat karhutla dilaporkan, apa dampaknya
Tanggal : Jumat, 11 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Presiden Minta Perusahaan Terlibat Karhutla Dilaporkan, Apa Dampaknya?

Presiden Prabowo Subianto meminta Polri melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Termasuk yang diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (7/9/2026). Presiden juga meminta identitas korporasi yang diduga terlibat ditelusuri dan dilaporkan kepadanya.

"Saya tertarik juga ya, itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diteliti terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke

saya," tegas Prabowo.

Kapoli Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan, Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan karhutla dari 200 laporan polisi yang diterima. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan 19 lainnya karena kelalaian.

Selain itu, Polri sedang memproses hukum delapan korporasi. Kepolisian juga mendalami 18 perusahaan yang dikenal sanksi pembekuan izin dan 42 perusahaan yang izinya dicabut untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana.

Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan Raja Julu Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nurson Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.

"Kalau perlu, kita segera cabut semuanya. Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah melewati batas saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tuturnya.

Presiden juga menekankan pentingnya mengutus kepemilikan korporasi yang diduga terlibat agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan Pemerintah terus memperkuat penanganan berbagai bencana, termasuk banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, gempa di Nusa Tenggara Timur, karhutla, serta erupsi gunung berapi.

Khusus penanganan karhutla, Prabowo meminta Pemerintah memperkuat perencanaan dengan mengutamakan mitigasi dan pencegahan, bukan hanya bertindak

setelah kebakaran terjadi.

Dia meminta Pemerintah memperbanyak sarana penanganan karhutla, termasuk helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, dan peralatan lain yang dibutuhkan agar kesiapsiagaan dapat ditingkatkan sebelum kebakaran terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai langkah Presiden meminta data korporasi yang terlibat karhutla sudah tepat. Menurut dia, keinginan Presiden jangan hanya sebatas instruksi semata.

"Penindakan sering berhenti di pelaku lapangan, sementara pemilik modal di belakang layar," ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (9/9/2026).

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(WALHI) Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, Presiden sebaiknya tidak sekadar mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat. Namun, kata dia, Presiden harus menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh.

"Proses ini harus dilakukan secara terbuka, membuka identitas perusahaan dan tidak dilakukan secara pandang bulu, termasuk apabila ada perusahaan yang terafiliasi dengan istana, kerabat istana, dan penguasa," tegas Boy saat dihubungi *Rabu* (9/9/2026).

Untuk mengetahui pandangan Daniel Johan dan Boy Jerry Even Sembiring mengenai langkah Presiden yang meminta laporan identitas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, berikut wawancaranya.

DANIEL JOHAN,
Anggota Komisi IV DPR

Langkah Baik Dan Harus Ditindaklanjuti



“Efek jera baru nyata kalau disertai proses pidana korporasi, pencabutan HGU secara permanen, dan penelusuran sampai kepada pemilik manfaat, bukan hanya nama perusahaan di atas kertas.”

Bagaimana Anda melihat langkah Presiden yang meminta laporan identitas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?

Ini merupakan langkah yang baik dan harus segera ditindaklanjuti. Selama ini, kelemahan penanganan karhutla justru di titik ini. Penindakan sering berhenti di pelaku lapangan, sementara pemilik modal di belakang layar. Perminatan langsung dari Presiden agar nama-nama korporasi, termasuk delapan yang sudah menjadi tersangka dan 18 yang masih didalami, sampai ke meja belah menunjukkan *political will* yang kuat. Namun, ini harus dikawal dan jangan berhenti pada instruksi.

Menurut Anda, apakah langkah ini akan memberikan efek jera?

Bisa memberikan efek jera kalau ditindaklanjuti melalui proses hukum, baik pidana maupun pidana. Membuka identitas saja tidak otomatis membuat jera kalau ujungnya

hanya sanksi administratif ringan, seperti pembekuan izin sementara.

Semestinya bagaimana?

Efek jera baru nyata kalau disertai proses pidana korporasi, pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) secara permanen, dan penelusuran sampai kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*), bukan hanya nama perusahaan di atas kertas. Harus tuntas dan publik tahu bahwa para pelaku korporasi ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebenarnya, apa dampak nyata jika identitas korporasi yang terlibat karhutla dibuka kepada Presiden dan publik?

Ada tiga dampak konkret. Pertama, publik bisa mengawasi apakah korporasi besar diperlakukan sama dengan masyarakat kecil di depan hukum. Kedua, ini bisa memutus modus lama, yakni lahan dibakar lalu cepat berubah menjadi kebun sawit

dalam waktu singkat, seperti yang disoroti Presiden sendiri. Ketiga, keterbukaan ini penting untuk daerah seperti Kalimantan Barat yang setiap tahun menanggung beban ISPA dan kerusakan ekologi akibat karhutla yang sering terhubung dengan korporasi perkebunan skala besar.

Lalu, mengenai hukuman kepada para pelaku, baik individu maupun korporasi, apakah saat ini hukumnya sudah tepat?

Belum tepat dan belum kuat dalam implementasinya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) sudah memiliki instrumen kuat, termasuk prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di Pasal 88, tetapi implementasinya lemah. Dari 138 tersangka, mayoritas masih individu di lapangan. Korporasi baru ada delapan yang sedang diproses dari puluhan yang diduga terlibat. ■ **NNM**

BOY JERRY EVEN SEMBIRING,
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Tak Hanya Tahu Identitas, Tapi Hukum Ditegakkan



“Sejarah penegakan hukum kita memang memperlihatkan bahwa negara ini gagal menerapkan penegakan hukum yang keras dan tegas kepada korporasi dan penerima manfaat.”

Bagaimana WALHI melihat langkah Presiden yang meminta laporan identitas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?

Hal ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, Presiden tidak cukup sekadar mengetahui identitas perusahaan. Presiden secara terbuka kepada publik harus menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang gagal mengamankan konsesinya.

Komitmen lainnya, proses ini harus dilakukan secara terbuka, dengan membuka identitas perusahaan dan tidak dilakukan secara pandang bulu, termasuk apabila ada perusahaan yang terafiliasi dengan istana, kerabat istana, dan penguasa.

Apakah langkah ini akan memberikan efek jera?

Ada dua hal penting. Perusahaan dijatuhi paksaan untuk melakukan pemulihan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Ruang penegakan administrasi menjadi kunci. Apabila ada ruang hukum yang kosong, Presiden dapat memberikan Perppu untuk mengakselerasi hal tersebut.

Penjatuhan sanksi administratif dan pemulihan ini tentu dapat diikuti dengan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, serta proses evaluasi yang diikuti dengan pencabutan dan pencetakan aset kerja.

Sebenarnya, apa dampak nyata jika identitas korporasi yang terlibat karhutla dibuka kepada Presiden dan publik?

Konsekuensinya tentu bisa membuka informasi kepada publik mengenai keterlibatan dalam pemberian izin dengan siapa pejabat yang menerbitkannya. Selanjutnya, sanksi so-

dal untuk memboikot perdagangan produk-produk yang terafiliasi dengan perusahaan yang gagal menjaga areal konsesinya akan memperkuat efek jera.

Selain itu?

Ruang penegakan hukum akan lebih mudah dikawal masyarakat.

Apakah langkah aparat penegak hukum dalam penanganan karhutla selama ini sudah maksimal?

Sejarah penegakan hukum kita memperlihatkan bahwa negara ini gagal menegakan penegakan hukum yang keras dan tegas kepada korporasi dan penerima manfaat.

Kenapa seperti itu?

Sejarah membuktikan, lokasi-lokasi yang terbakar pada masa lalu telah berubah menjadi kebun sawit atau kebun kayu. ■ **NNM**